

PERSPEKTIF IDEOLOGI DALAM WACANA SILANG TUTUR “KONVENSI PARTAI GOLKAR”

oleh Syahrul R.
FBSS Universitas Negeri Padang

Abstract

The study on the ideological perspective in this article uses a critical discourse analysis that views discourse as action by considering certain context, historical context, element of power, and ideology. The material of analysis consists of newspaper reports about the discourse coming from various figures during the time of the Golkar Party Convention from its beginning to Wiranto's election as the presidential candidate nominated by the party. The article shows the emergence, in the reports, of various pro- and contra-convention perspectives coming from figures outside the party as well as various ideological perspectives brought up by party figures in their attempts to win the convention as the presidential candidate nominated by the party.

Keywords: ideological perspective, party convention, critical discourse analysis

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini analisis wacana mengalami perkembangan yang sangat pesat. Analisis Wacana Kritis (AWK) sering disebut-sebut sebagai bentuk perkembangan terakhir dari analisis wacana. Di bawah label AWK, analisis wacana bukan hanya mengkaji struktur dan aspek-aspek internal wacana. Dengan pendekatan yang holistik, AWK menempatkan struktur wacana sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan aspek fungsi wacana di masyarakat. Keduanya dipandang sebagai komposit *struktur-fungsi* pembangun wacana.

Salah satu karakteristik AWK adalah memperhatikan aspek ideologi. Wacana dipandang sebagai praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Teori-teori ideologi menyatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk

memproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu strategi utamanya adalah dengan membuat kesadaran pada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara *taken for granted*.

Fairclough (1995) memandang bahwa setiap institusi sosial mengandung berbagai formasi ideologi diskursif (*ideologi-discursive formations* disingkat IDF) yang berkaitan dengan berbagai kelompok yang berbeda dalam institusi tersebut. Biasanya satu IDF yang dominan. Masing-masing IDF merupakan “masyarakat tutur” dengan norma-norma wacana dan norma-norma ideologis sendiri. Sesuai dengan norma-norma IDF, subjek institusi disusun dalam posisi-posisi subjek dengan jalinan ideologis yang mungkin tidak disadari. Satu karakteristik IDF yang dominan adalah memiliki kapasitas untuk “menaturalisasikan” berbagai ideologi, yakni untuk memenangkan penerimaan bagi mereka sebagai akal sehat yang tidak bersifat ideologis.

Ideologi yang mencuat di dalam “Konvensi Partai Golkar” menarik dikaji mengingat ajang ini sejak awal dianggap kontroversial: Apakah ajang ini upaya untuk melanggengkan kekuasaan atau benar-benar terobosan baru’ dalam mencari figur pemimpin nasional yang berkualitas? “Konvensi Partai Golkar” sejak awal telah “dicurigai” memiliki nuansa politis yang kental, yaitu mencari celah tertentu untuk menyelamatkan Akbar Tanjung yang sedang tersandung masalah. Dalam masa penantian putusan Mahkamah Agung tersebut, Golkar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencalonkan diri mengikuti konvensi. Di sinilah menariknya konvensi ini: Mengapa baru sekarang Golkar membuka ajang seperti ini? Mengapa bukan semenjak dulu? Apakah benar konvensi ini hanya sekedar akal-akalan untuk menyelamatkan sang ketua umum yang sedang tersandung masalah hukum? Ideologi apa yang dimunculkan oleh figur peserta konvensi?

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis ingin membahas “Perspektif Ideologi dalam Wacana Silang Tutur “Konvensi Partai Golkar” karena pertanyaan-pertanyaan itu perlu dicarikan jawabannya dengan menganalisis kembali pemberitaan berbagai media massa mengenai proses konvensi hingga terpilihnya Wiranto sebagai

calon presiden Partai Golkar.

B. Perspektif Ideologi

1. Hakikat dan Karakteristik AWK

Van Dijk (dalam Holmes, 2001) mendefinisikan AWK sebagai salah satu jenis studi wacana secara kritis yang mengkaji hubungan antara wacana, kekuasaan, dominasi, ketidaksetaraan sosial pada masing-masing hubungan sosial. Dari defenisi ini kata “kritis” memberikan ciri AWK sehingga membedakannya dengan pendekatan analisis wacana yang lain.

Munculnya teori kritis sebenarnya merupakan bentuk reaksi penolakan terhadap pemikiran modem yang mensyaratkan ilmu bebas nilai. Pemikiran modem memisahkan aspek transenden ilmu dengan aspek praksis. Bagi teori kritis, praksis merupakan aspek kehidupan sosial karena pemahaman praksis menentukan bagaimana suatu teori dengan maksud praktis dilaksanakan (Hardiman, 1990). Dengan demikian, di dalam ciri kritis tampak adanya usaha untuk mempertautkan aspek transenden teori dengan aspek praksis.

Pemikiran tersebut sangat mempengaruhi pemikiran yang dikembangkan dalam AWK. Fairclough (1995), misalnya menyatakan bahwa penggunaan istilah “kritis” dalam pendekatan AWK mempunyai dua implikasi: di satu pihak berkaitan dengan komitmen teori dan metode dialektika, yang memahami berbagai hal berdasarkan kesalinghubungan; dan di lain pihak berkaitan dengan pandangan bahwa kritik memperjelas kesalinghubungan dan mata rantai sebab-akibat berbagai hal.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran itu tampak dipegang teguh oleh Fairclough. Fairclough (1989) membedakan dimensi AWK atas tiga hal, yakni (1) deskripsi bagian-bagian yang berkaitan dengan piranti formal teks, (2) interpretasi yang berkaitan dengan hubungan antara teks dan interaksi dengan melihat teks sebagai produk dan sebagai sumber di dalam proses interpretasi, dan (3) eksplanasi yang berkaitan dengan hubungan antara interaksi dan konteks sosial dengan kepastian sosial proses produksi dan interpretasi serta efek-efek sosialnya.

Uraian tersebut mengisyaratkan bahwa AWK mempunyai karakteristik tertentu yang membedakannya dengan analisis wacana yang lain. Eriyanto (2001) dengan merangkum pendapat van Dijk, Fairlough, dan Wodak, menyajikan karakteristik AWK sebagai berikut.

Pertama, AWK memandang bahwa wacana merupakan tindakan (*action*). Dengan pemahaman semacam ini berarti wacana merupakan bentuk interaksi. Konsekuensi dan pemahaman ini adalah (1) wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyangga atau yang lain; dan (2) wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol, bukan sesuatu diluar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

Kedua, AWK mempertimbangkan konteks sehingga wacana dipandang, diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Ada tiga hal yang sentral dalam pengertian wacana, yakni teks, konteks, dan wacana.

Ketiga, AWK memperhatikan konteks kesejarahan. Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk dapat memahami teks adalah menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu.

Keempat, AWK juga mempertimbangkan elemen-elemen kekuasaan (*power*) dalam analisisnya. Setiap wacana yang muncul tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, netral, tetapi pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan merupakan salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat, misalnya kekuasaan laki-laki wanita, kulit putih atas kulit hitam, kekuasaan perusahaan membentuk dominasi kelas atas kelas bawah.

Kelima, AWK juga memperhatikan aspek ideologi. Wacana dipandang sebagai praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Teori-teori ideologi menyatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk memproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu strategi utamanya adalah dengan membuat kesadaran pada khalayak bahwa dominasi diterima

secara *taken for granted*.

2. Hubungan antara Bahasa dan Ideologi

Berikut ini dibahas hubungan antara bahasa dengan salah satu hasil dari proses berpikir manusia yang merupakan kumpulan konsep bersistem dan nilai-nilai yang dapat mendasari tingkah laku berbahasa manusia, yakni *ideologi*. Kata *ideologi* muncul pertama kali dalam revolusi Perancis. *Ideologi* adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup (Depdikbud, 1995). Adapun karakteristik ideologi terdiri dari (1) konsep sebuah teori yang menjelaskan secara komprehensif tentang pengalaman manusia dan dunia luar, (2) seperangkat organisasi program sosial dan politik, (3) komitmen, dan (4) yang berhubungan dengan kepemimpinan dan intelektual.

Eagleton (dalam Wetherell, Taylor, & Yates, 2001) mengemukakan ideologi terdiri atas cara berpikir dan bertingkah laku yang ada dalam masyarakat yang membentuk cara-cara yang tampak secara natural atau tidak diragukan lagi sebagai anggotanya. William (dalam Eriyanto, 2001) mengklasifikasikan ideologi dalam tiga ranah, yakni (1) seperangkat kategori yang dibuat dalam kesadaran palsu di mana kelompok yang berkuasa atau dominan menggunakannya untuk mendominasi kelompok lain yang tidak dominan yang tampak secara natural, (2) ideologi merupakan sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu, dan (3) proses umum produksi makna dan ide. Foucault (dalam Luke, 1998) menjelaskan hubungan antara ideologi, bahasa, dan wacana digali sebagai bidang-bidang utama teori sosial dan linguistik, masalah utama teori dan analisis sosial adalah kemustahilan pencarian ideologi sebagai suatu entitas di dalam dan dari diri individunya, mandiri, dan mengawali situasi dan formasi wacana. Pembahasan bahasa dan ideologi tidak dapat dilepaskan dari konteks hubungan bahasa dan kekuasaan (Fairclough, 1995) karena perilaku ideologi hanya dapat diamati dalam praktek kekuasaan. Pembahasan tentang hubungan antara bahasa dan ideologi baru akan sampai pada inti permasalahan

apabila sampai pada pembahasan tentang pengaruh antara ideologi dan bahasa, serta bagaimana ideologi ditransformasikan dalam penggunaan bahasa.

Ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem, baik itu ide maupun norma-norma. Nilai-nilai dan keyakinan yang dijadikan dasar pendapat dalam memberikan arah dan tujuan dalam tindakan adalah sesuatu yang abstrak dan ada dalam pikiran. Sesuatu yang abstrak ini dapat ditransformasikan ke dalam wacana lewat dua cara (Fairclough, 1995; dan Lee, 1992). Cara yang pertama adalah dalam wujud lambang-lambang atau tanda-tanda (*sign*). Cara yang kedua adalah melalui perspektif pelaporan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam wacana.

Kehadiran ideologi di dalam wacana, dalam wujud tanda-tanda, dapat dilihat dari struktur-struktur bahasa dan pada berbagai tingkatan bahasa (Fairclough, 1995). Berdasarkan penelitian Fowler (1986), Lee (1992), dan Fairclough (1995) dapat dijelaskan bahwa wadah atau tempat di mana ideologi “memperlihatkan diri ada dalam struktur transitivitas, nominalisasi, struktur leksikal atau penamaan, modalitas, struktur tematik, pengaturan proposisi: informasi lama dan baru, metafora, dan tindak tutur.

Berpedoman pada uraian tersebut, AWK silang tutur “Konvensi Partai Golkar” yang dijadikan sampel dalam artikel ini dianalisis secara makro dan mikro. Sesuai dengan pendapat van Dijk (1998) bahwa analisis wacana tidak dibatasi hanya pada struktur teks, tetapi struktur wacana itu sendiri yang menunjukkan atau menandakan sejumlah makna.

Selanjutnya wacana silang tutur “Konvensi Partai Golkar” dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Fairclough (1989) yang membedakan dimensi analisis wacana kritis atas tiga hal, yakni (1) deskripsi bagian-bagian yang berkaitan dengan piranti format teks, (2) interpretasi yang berkaitan dengan hubungan antara teks dan interaksi dengan melihat teks sebagai produk dan sebagai sumber di dalam proses interpretasi, dan (3) eksplanasi yang berkaitan dengan hubungan antara interaksi dan konteks sosial dengan kepastian sosial proses produksi dan interpretasi serta efek-efek sosialnya.

C. Perspektif Pemberitaan

Di dalam perspektif pemberitaan ini, penulis akan membagi pembahasan atas tiga hal, *pertama*, perspektif yang pro kepada “Konvensi Partai Golkar”; *kedua*, perspektif yang kontra kepada “Konvensi Partai Golkar”; dan *ketiga*, perspektif ideologi yang diusung oleh calon presiden peserta “Konvensi Partai Golkar” , baik ketika melakukan kampanye pemilu legislatif maupun ketika pelaksanaan konvensi.

1. Perspektif Pro “Konvensi Partai Golkar”

Perspektif pro “Konvensi Partai Golkar” adalah sudut pandang dalam melihat suatu peristiwa yang didasari oleh nilai-nilai keyakinan, ide-ide dan pandangan dari berbagai pihak yang memiliki sikap: (1) mendukung atau memihak. (2) positif atau setuju (3) suka, senang serta simpati pada “Konvensi Partai Golkar”.

Sebelum dikutip pemberitaan yang terkait dengan perspektif pro ini, perlu diinformasikan bahwa “Konvensi Partai Golkar “ dimulai 11 Juli 2003 dan berakhir 20 April 2004. Konvensi dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu tahap persiapan, penjaringan, penyaringan, serta tahap pemilihan, yang sekaligus merupakan penetapan calon presiden dari Partai Golkar bagi pemenang konvensi.

Perspektif pro “Konvensi Partai Golkar” terlihat di dalam berita yang dimuat *Republika online* berjudul “Nurcholis Madjid Putuskan Ikut Konvensi Partai Golkar” berikut. Di dalam wacana ini, Nurcholis adalah *partisipan*, *topik* adalah judul pemberitaan dan *konteks* adalah peristiwa konvensi.

[...]

“Ini konsekuensi **kesamaan asasi platform** saya dengan Partai Golkar, sekalipun berbeda dalam ungkapan kalimatnya,” jelas Cak Nur, saat dalam jumpa pers, kemarin (30/6). [...]

Penyelenggaraan konvensi PG, sangat **menarik** baginya. Dengan konvensi, maka ada proses rekrutmen calon presiden secara **terbuka**. Siapapun **bisa mencalonkan**

diri, dan tidak terbatas pada kalangan Golkar saja. [...]
(*Republika online*, 1 Juli 2004).

Partisipan yang pro pada “Konvensi Partai Golkar” tersebut adalah Nurcholis Madjid, yang akrab disapa dengan Cak Nur. Cak Nur tertarik mendaftar sebagai peserta konvensi adalah karena adanya **kesamaan asasi platform** dengan Partai Golkar. Ini berarti bahwa Cak Nur menilai perjuangan Partai Golkar sejalan dengan perjuangan beliau. Partai Golkar dengan Golkar Barunya *memiliki platform* “Bersatu untuk Maju”, yang ternyata di mata Cak Nur memiliki kesamaan asasi. “Bersatu untuk Maju” berarti bahwa Partai Golkar akan bersatu untuk memajukan bangsa Indonesia dalam segala bidang, baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Istilah *platform* di dalam pemberitaan tersebut adalah kesamaan pandangan atau kesamaan prinsip yang dianut Cak Nur terhadap Konvensi Partai Golkar.

Cak Nur adalah seorang akademisi dan cendekiawan muslim yang tentunya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Cak Nur merasa **tertarik** menjadi peserta konvensi karena ia menilai konvensi ini **terbuka**, tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial atau profesi. Siapapun **bisa mencalonkan diri**. Ideologi inilah yang menurut Cak Nur merupakan daya tank konvensi ini, yaitu terbuka dan siapapun bisa mencalonkan diri. Ini berarti bahwa konvensi tidak membeda-bedakan asal usul peserta, dari kalangan mana pun, dapat menjadi peserta, asal sesuai prosedur yang ditetapkan panitia konvensi. Cak Nur menilai bahwa Partai Golkar tidak lagi seperti dulu, partai yang alergi terhadap perbedaan. Di masa Orde Baru, Golkar adalah penguasa tunggal, yang tidak memberikan ruang gerak terhadap demokrasi. Golkar membuat semua aturan menjadi seragam. Tidak boleh ada yang berbeda, karena bila hal tersebut terjadi, itu dianggap pembangkangan. Ideologi terbuka yang ditawarkan Partai Golkar melalui konvensi ini menyiratkan bahwa partai ini sudah membuka kran demokrasi secara lebar, apalagi konvensi ini terbuka luas dan membuka kesempatan kepada semua warga negara Indonesia.

Dengan demokrasi, partai ini tentu tidak memaksakan kehendak kepada pesertanya. Konvensi ini hams berjalan secara fair dan transparan, terbebas dari kepentingan. Setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kemenangan, tentunya apabila visi dan misi sang peserta konvensi mampu meyakinkan pemilih yang terdiri atas pengurus Partai Golkar mulai dari kabupaten/kota, provinsi, dan pengurus pusat.

Pemberitaan lainnya mengenai partisipan yang pro konvensi ini terlihat pada kutipan berita *Jawa Pos dotcom* berjudul “Konvensi Golkar Di-Launching” berikut.

[...]

Ketua Badan Pengawas Panitia Konvensi, Soelasikin Moerpratomo kepada koran ini menjelaskan, pihaknya akan mengawasi pelaksanaan konvensi tersebut. Bahkan, dirinya **berani berjanji** bahwa hal itu akan berjalan fair, adil, independen, serta sesuai harapan masyarakat.

“Nanti calon yang **curang** langsung diberi sanksi, tidak boleh lagi ikut konvensi”, tegasnya. [...] (*Jawa Pos dotcom*, 11 Juli 2003).

Kutipan dari pemberitaan tersebut memperlihatkan betapa konvensi ini akan berlangsung secara fair, adil, dan independen. Ini dijamin oleh Ketua Badan Pengawas Panitia Konvensi, Soelasikin Moerpratomo. Soelasikin berani berjanji dalam kapasitasnya sebagai ketua badan pengawas konvensi. Ideologi yang muncul dalam pemberitaan ini adalah bahwa Konvensi Partai Golkar benar-benar demokratis. Golkar benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang selama masa Orde Ban’ tidak pernah terlihat.

Dalam konteks politik pada masa Orde Balm, Golkar adalah penguasa tunggal. Golkar menguasai seluruh lembaga tinggi negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Baik dari pusat maupun daerah-daerah. Suara-suara yang berusaha meneriakkan agar peran lembaga-lembaga tersebut dikembalikan kepada porsinya, tidak pernah

membuahkan hasil. Katakanlah, misalnya, DPR, yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Wakil rakyat dari Golkar mendominasi lembaga tersebut, hanya sekian persen dari PPP dan PDI. Peran wakil rakyat nyaris lumpuh karena sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak bisa “bersuara”. Ideologi kekuasaan yang tanpa batas sangat mendominasi lembaga negara, mulai dari pusat hingga ke daerah.

Namun, kenyataan tersebut bertolak belakang dengan pelaksanaan konvensi Soelasikin Moerpratomo mempertaruhkan kredibilitasnya bahwa konvensi akan berlangsung secara fair, adil, dan independen. Ideologi yang menyertai kata-kata tersebut adalah bahwa siapa pun yang masuk ke dalam konvensi tidak akan kecewa. Konvensi akan menganut nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang disiratkan oleh kata-kata tersebut. Konvensi tidak akan mengorbankan hak-hak peserta dalam meraih dukungan untuk mencapai calon presiden Partai Golkar. Calon yang curang langsung dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan konvensi.

2. Perspektif Kontra “Konvensi Partai Golkar”

Perspektif kontra “Konvensi Partai Golkar” adalah sudut pandang dalam melihat suatu peristiwa yang didasari oleh nilai-nilai keyakinan, ide-ide dan pandangan dari berbagai pihak yang memiliki sikap: (1) tidak mendukung atau tidak memihak, (2) negatif, tidak setuju, atau keberatan, dan (3) tidak suka, tidak simpati pada “Konvensi Partai Golkar”.

Perspektif kontra pada “Konvensi Partai Golkar” pada umumnya datang dari pengamat politik. Pengamatan mereka tidak lepas dari konteks politik yang terjadi saat proses konvensi berlangsung. Mereka menilai bahwa konvensi ini hanyalah akal-akalan Partai Golkar karena “sang ketua umum” Akbar Tanjung sedang dirundung masalah hukum. Pemberitaan yang muncul di berbagai media massa cenderung menyudutkan Akbar Tanjung dan Partai Golkar. Berikut dipaparkan komentar dari pengamat politik, antara lain: Riswandha Imawan, Indra J. Piliang, dan Bram Zakir.

Menurut Riswandha Imawan, dalam berita berjudul “Ibarat Pendekar Belut Kuning”, (*Java Pos dotcom*, 16 Februari 2004) kelihaihan Akbar Tanjung (AT) berkelit dalam setiap masalah yang menimpanya “ibarat belut disiram oli”. Selalu bisa berkelit. Meski, itu menepis keadilan masyarakat dan berkelit dari kebenaran logika umum. Dia seakan berjalan di atas logika tanpa logika. Wacana yang dilontarkan Riswandha tersebut terlihat pada kutipan berikut.

Rakyat benar-benar dibuat **tak berdaya** oleh **permainan petak umpet** terdakwa di balik pasal-pasal hukum. Kasus AT benar-benar membuat jalan **reformasi** di Indonesia **bertambah gelap**. Kepastian hukum yang jadi landasan roda demokratisasi dan reformasi politik makin tak tampak wujudnya. [...]

Simak saja kengototan Golkar menghilangkan syarat status bukan terdakwa untuk menjadi capres dalam RUU No.23/2003. Perdebatan yang sengit terjadi sampai subuh dan baru diputuskan 15 menit sebelum pembahasan dinyatakan berakhir melalui lobi antarpimpinan fraksi di DPR. Kelicinan “pendekar belut kuning” kembali terbukti dalam forum lobi itu. [...]

Kasus AT membuktikan, **pembusukan politik** itu tidak sekadar terjadi pada tataran individu.

[- ..]

Selanjutnya, Indra J. Piliang (berita *Jawa Pos dotcom*, 20 April 2004) menilai konvensi Partai Golkar yang akan berlangsung Selasa (20/4) perlu menampilkan sosok capres yang mampu dipercaya publik, namun jika sebaliknya maka **resiko** akan ditanggung Golkar. “Saat ini **simpati** untuk Akbar Tanjung **lemah**, sehingga konvensi Golkar kali ini betul-betul menjadi pertarungan akhir Golkar”, katanya.

Sementara Bram Zakir (berita *Jawa Pos dotcom*, idem) menilai konvensi Golkar hanya merupakan **kepentingan seorang tokoh politik** ketimbang kepentingan partai secara keseluruhan. Hal itu, katanya,

menjadi semakin jelas jika mempelajari **politik** kontemporer Indonesia yang banyak diwarnai **kompromi**. Kompromi lebih menunjukkan penyembunyian **kebusukan** dari masing-masing tokoh politik tersebut. Jadi konvensi lebih merupakan akal-akalan saja [. . .].

Bila disimak lebih lanjut pernyataan-pernyataan pengamat politik tersebut, tampak bahwa ketiganya melontarkan isu kontra terhadap konvensi. Ideologi yang dimunculkan bertentangan dengan nurani demokrasi yang seyogianya dijunjung tinggi oleh setiap partai. Riswandha dengan sinis memberikan analogi bahwa sepak terjang Akbar Tanjung bagaikan “pendekar belut kuning”, yang lihai dan licik. Ia berhasil lepas dari jeratan hukum.

Ideologi yang dilontarkan Riswandha di balik kata-kata **tak berdaya, permainan petak umpet, reformasi bertambah gelap serta pembusukan politik** merupakan ideologi yang sarat dengan nilai-nilai atau norma-norma yang bertentangan demokrasi. Demokrasi yang seharusnya menganut ideologi terbuka, jujur, dan transparan, dinodai oleh cara-cara yang tidak etis, kasar, penuh kebohongan dan kelicikan. Akbar menggunakan segala cara untuk melenggang ke panggung calon presiden. Begitulah Riswandha menilai sepak terjang Akbar Tanjung dengan kendaraan politiknya Partai Golkar yang dianggap bermain **busuk**. Hal inilah yang mengakibatkan **reformasi** masih **gelap**, belum berjalan menurut rel yang sesungguhnya.

Indra J. Piliang menilai konvensi Partai Golkar perlu menampilkan sosok capres yang mampu dipercaya publik, namun jika sebaliknya maka **resiko** akan ditanggung Golkar. Simpati terhadap Akbar Tanjung lemah, sehingga konvensi Golkar kali ini betul-betul menjadi **pertaruhan akhir** Golkar. Pengamat ini melihat bahwa figur sang ketua umum sudah melorot.

Senada dengan Piliang, Bram Zakir menilai konvensi Golkar hanya merupakan **kepentingan seorang tokoh politik** ketimbang kepentingan partai secara keseluruhan. Konvensi lebih merupakan **akal-akalan** untuk mengelabui publik bahwa Golkar benar-benar telah berubah. Padahal yang terjadi, tersirat dari ucapannya, konvensi ini hanyalah “muslihat”

untuk menyelamatkan muka sang ketua umum Partai Golkar. Paradigma baru yang dilontarkan partai ini, yang ingin memperjuangkan reformasi, ternyata hanya sekedar retorika. Ideologi yang dimunculkan partai ini, secara tidak langsung, adalah melanggengkan kekuasaan yang selama masa Orde Baru telah mereka buktikan. Keserakahan terhadap kekuasaan dengan mengelabui rakyat, ternyata masih belum bisa dihapuskan begitu saja.

3. Perspektif Ideologi Calon Presiden Peserta Konvensi

Ideologi yang diusung para capres peserta konvensi ini dapat dilihat pada dua kegiatan: kampanye legislatif dan penyampaian visi misi ketika konvensi yang sesungguhnya: pemilihan calon presiden. Karena kampanye pemilu legislatif merupakan bagian dari proses konvensi, maka ideologi yang dimunculkan di dalam kampanye tidak dapat dilepaskan dari konteks konvensi tersebut.

Dalam analisis wacana kritis ini, calon presiden sebagai *partisipan*, pemberitaan media massa sebagai *topik*, dan kampanye legislatif maupun pemilihan capres dalam arena konvensi sebagai *konteks*, memiliki kaitan erat dalam melihat konstelasi pespektif ideologi. Ideologi yang dimunculkan memang erat kaitannya dengan latar belakang sang calon presiden. Calon yang berlatar belakang militer, misalnya, cenderung melontarkan ideologi pertahanan dan keamanan. Calon yang berlatar belakang pengusaha, cenderung melontarkan ideologi kesejahteraan dan masalah pangan.

Dan tujuh calon presiden yang lolos konvensi, dua orang mengundurkan diri (Sri Sultan HB X dan Jusuf Kalla), sehingga tersisa lima: Wiranto, Prabowo Subianto, Surya Paloh, Aburizal Bakri, dan sang ketua umum yang memperoleh kasasi bebas dari MA: Akbar Tanjung. Akbar Tanjung langsung aktif berkampanye selepas putusan bebas tersebut.

Akbar Tanjung maju ke konvensi setelah lolos dari jeratan hukum. Kasasinya diterima oleh Mahkamah Agung. Ia dinyatakan tidak bersalah dalam skandal Bulog. Ketika berkampanye di Malang,

Akbar tetap percaya diri. Akbar mengumbar janji-janji sebagai berikut: (1) **Memberantas korupsi**, (2) **Mengatasi pengangguran**, (3) **Harga sembako yang terjangkau**, (4) **Meningkatkan anggaran pendidikan hingga 20 persen**, dan (5) **Wajib belajar 12 tahun** (*Java Pos*, 13 Maret 2004).

Inilah ideologi seorang Akbar, yang sangat percaya diri terhadap program-programnya. Pemberantasan korupsi adalah ideologi yang kontroversial. Ia dengan berani melontarkan gagasan tersebut tanpa rasa bersalah. Padahal banyak pengamat yang menilai putusan MA tersebut penuh rekayasa politik. Akbar seorang yang lihai. *Pemberantasan korupsi, pengangguran, dan harga sembako yang terjangkau* adalah tiga pilar yang saling terkait, yakni apabila korupsi mampu dikikis, anggaran negara dapat diselamatkan. Hal itu tentu saja dapat menciptakan lapangan kerja, dan sebagai akibatnya harga sembako dapat dijangkau oleh masyarakat. Kemudian, *anggaran pendidikan dan wajib belajar sembilan tahun* merupakan wacana yang terkait dengan penyediaan sumber daya manusia sebagai investasi masa depan.

Berbeda dengan Wiranto, mantan Menhankam ini bersumpah di hadapan peserta Konvensi partai Golkar bahwa ia **tidak akan membiarkan keterpurukan bangsa Indonesia terpuruk**. [...] “Saya bersumpah untuk tidak mengecewakan rakyat,” kata Wiranto, yang diawal-awal penyampaian visi dan misinya **menampilkan cuplikan gambar semasa dirinya berkarir di militer dan terlibat dalam peristiwa penting di era reformasi** (*Gatra.Com*, 20 April 2004).

Wacana yang digagas Wiranto memang luar biasa. Ideologi yang ditawarkan mampu memukau peserta konvensi, apalagi diselengi dengan cuplikan gambar semasa ia masih di militer dan terlibat dalam peristiwa penting di era reformasi. Sumpah seorang “mantan jenderal” bukanlah sumpah biasa karena ia mempertaruhkan kredibilitas dirinya. Sumpah tersesebut pantang dilanggar. Inilah ideologi seorang ksatria, yang tegar dengan komitmen demi mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan makmur. *Bangsa yang terpuruk* menurut Wiranto merupakan kondisi yang menyedihkan dan harus segera diatasi.

Prabowo Subianto menawarkan ideologi mengenai stabilitas nasional. “Pak Prabowo juga menyatakan, ekonomi bangsa ini tidak akan baik tanpa ada **stabilitas nasional**,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jateng HM Hasbi mengutip pernyataan Prabowo pada pertemuan tertutup itu (*Media Indonesia Online*, 20 Juli 2003). Ucapan Prabowo tersebut disampaikan pada pertemuan tertutup di Kantor Sekretariat DPD Golkar Jateng.

Surya Paloh secara implisit menyerang Akbar Tanjung dalam kampanyenya. Peserta konvensi calon presiden tersebut dalam kampanyenya di Pekalongan meminta kepada para pendukung Partai Golkar **untuk tidak memilih capres busuk dan cacat hukum** (*Media Indonesia Online*, 12 Maret 2004). Ideologi yang disampaikan Surya Paloh memang kontroversial. Sebagai pendatang di Partai Golkar, ia secara tidak langsung menyerang sang ketua umum partai, yang seharusnya dihormatinya. Setidaknya, ia harus memiliki etika politik dalam berkampanye.

Tetapi Surya Paloh memang berani. Di alam demokrasi, nilai-nilai kejujuran, menyampaikan kebenaran, dan menyuarakan hati nurani memang bukanlah hal yang tabu. Tetapi aturan main dalam konvensi jelas-jelas tidak boleh menyudutkan calon lainnya. Istilahnya: “sesama bis kota tidak boleh saling mendahului”.

Aburizal Bakri menyuarakan ideologi mengenai harga diri bangsa dan kesejahteraan bagi masyarakat, apalagi masyarakat kelas bawah. Dalam kampanyenya di Riau, ia berujar: “Kita **malu sebagai bangsa Indonesia** yang kaya sumber daya alam, tetapi juga sebagai negara pengimpor beras terbesar di dunia. Kita harus buktikan bahwa apa yang telah dicapai Partai Golkar zaman dulu harus direbut kembali dan **swasembada pangan ditingkatkan**. Golkar **menjanjikan membuat kredit bagi masyarakat dan meningkatkan swasembada pangan** (*Kompas*, 17 Maret 2004).

Demikianlah “pertarungan” ideologi yang dilontarkan para calon presiden tersebut. Ideologi yang “bertarung” antara lain: ideologi mengenai pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, pendidikan,

ideologi pertahanan dan keamanan serta stabilitas nasional, ideologi yang berkaitan dengan keterpurukan bangsa, ideologi yang berkaitan dengan calon presiden yang cacat hukum, serta ideologi yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pangan.

Ideologi tersebut bertarung dalam rangka mencari dukungan rakyat pemilih dan memang hasilnya tidak mengecewakan. Partai Golkar dengan mesin politiknya yang canggih mampu meraup suara mayoritas dalam pemilu legislatif. Partai Golkar berhasil memenangkan suara nomor satu di antara tujuh partai yang memperoleh suara signifikan.

D. Penutup

Demikianlah paparan singkat artikel ini, yang menyajikan perspektif ideologi dalam wacana silang tutur Konvensi Partai Golkar. Analisis wacana kritis yang digunakan dalam menguak persoalan di seputar konvensi ini sering disebut-sebut sebagai bentuk perkembangan terakhir dari analisis wacana. Di bawah label AWK, analisis wacana bukan hanya mengkaji struktur dan aspek-aspek internal wacana. Dengan pendekatan yang holistik, AWK menempatkan struktur wacana sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan aspek fungsi wacana di masyarakat.

Analisis wacana kritis (AWK) memiliki karakteristik yang berbeda dengan analisis wacana lainnya. Karakteristik tersebut adalah (1) AWK memandang bahwa wacana merupakan tindakan (*action*); (2) AWK mempertimbangkan konteks sehingga wacana dipandang, diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu; (3) AWK memperhatikan konteks kesejarahan; (4) AWK mempertimbangkan elemen-elemen kekuasaan (*power*) dalam analisisnya; dan (5) AWK memperhatikan aspek ideologi.

Perspektif ideologi yang dianalisis dalam wacana silang tutur “Konvensi Partai Golkar” ini terdiri atas perspektif pro konvensi, perspektif kontra konvensi, dan perspektif ideologi calon presiden peserta konvensi. Pemberitaan yang muncul di dalam perspektif pro konvensi adalah Cak Nur dan Sulasikin Moerpratomo. Pemberitaan yang muncul

dalam perspektif kontra konvensi adalah Riswandha Imawan, Indra J. Piliang, dan Bram Zakir. Pemberitaan yang muncul dalam perspektif ideologi calon presiden peserta konvensi adalah Akbar Tanjung, Wiranto, Prabowo Subianto, Surya Paloh, dan Aburizal Bakri.

DAFTAR RUJUKAN

- Depdikbud. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKIS.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. New York: Longman Group Limited.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis the Critical Study of Language*. New York: Longman Group Limited.
- Foucault, Michael. 2003. *Kritik Wacana Bahasa*. Diterjemahkan oleh Ridwan Inyik Munzier. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Fowler, Roger. 1986. *Linguistik Critism*. Oxford: Oxford University Press.
- Gatra.Com. "Wiranto Sumpah Tak Akan Biarkan Bangsa Terpuruk". Dimuat tanggal 20 April 2004.
- Hardiman, Fransisco Budi. 1990. *Kritik Ideologi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Holmes, Jenet. 2001. *The Introduction to Sociolinguistics*. Harlow: Pearson Education.
- Imawan, Riswandha. 2004. "Ibarat Pendekar Belut Kuning" dimuat *Jawa Pos dotcom*. 15 Februari 2004.
- Jawa Pos dotcom. "Lemah, Simpati pada Akbar Tanjung". Dimuat tanggal 20 April 2004.
- Jawa Pos. "Akbar Tanjung Kampanye di Malang". Dimuat 13 Maret 2004.
- Kompas. "Kampanye Aburizal Bakri di Riau". Dimuat 17 Maret 2004.
- Lee, D. 1992. *Competing Discourse: Perspective and Ideology in Language*. New York: Longman Publishing.

- Luke, A. 1998. *Concise Encyclopedia of Pragmatics*. London: British Library Cataloguing in Publication Data.
- Media Indonesia Online*. "Prabowo Subianto Kampanye Capres di Jawa Tengah". Dimuat 20 Juli 2003.
- Media Indonesia Online*. "Surya Paloh: Jangan Pilih Capres Cacat Hukum". Dimuat 12 Maret 2004.
- Republika Online*. "Nurcholis Madjid Putuskan Ikut Konvensi Partai Golkar". Dimuat 1 Juli 2003.
- van Dijk, Teun A. 1998. *Critical Discours*. <http://www.let.uva.nl/teun/cd/html>. Diakses 25 Februari 2004.
- Wetherell, Margaret; Taylor, Stephanie; dan Yates J. Simeu (Ed.). 2001. *Discourse Theory and Practice: A Reader*. London: Sage Publication.